

OMBUDSMAN GELAR FGD PENGADAAN BUKU MELALUI DANA BOS

Rabu, 19 Juni 2019 - Dian Megawati Tukuboya

KORIDORZONE.COM, TERNATE-Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara menggelar Focus Group Discussion sebagai salah satu rangkaian kegiatan Rapid Assessment (Kajian Cepat) Ombudsman dengan tema Efektivitas Pengadaan Buku Teks Utama melalui Dana BOS Â bertempat di meeting room Hotel Batik Ternate, Â Senin 17 Juni 2019.

Kegiatan ini Â melibatkan Kepala-Kepala Â SD dan SMP Â Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan sebagai peserta, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan sebagai narasumber.

Menurut Â Ombudsman, Â temuan-temuan dari hasil observasi Â periode Mei-Juni 2019 di Ternate dan Tidore secara garis besar Â masih ada orang tua siswa yang mengeluhkan pembelian buku tema maupun buku mata pelajaran (teks utama) sebagai pegangan siswa di rumah, karena masih ada beberapa sekolah yang tidak mengizinkan siswanya Â membawa pulang buku teks utama ke rumah dengan alasan rasio jumlah buku dan siswa belum 1:1.

"Alasan lain karenaÂ buku teks utama yang sering hilang dan rusak, sehingga siswa tidak diperkenankan Â membawa pulang", ungkap Muhammad Iradat, Asisten Ombudsman yang juga penanggung jawab kegiatan.

Menurutnya tujuan dari 20% Dana BOS digunakan untuk pembelian buku adalah tidak ada lagi pembebanan kepada siswa maupun orang tua Â terkait pembiayaan pembelian buku. "Sebagaimana Â dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana BOS, 20% alokasi Dana BOS untuk pembelian buku adalah salah satu wujud pendidikan bebas biaya untuk satuan pendidikan dasar wajib belajar 9 tahun," ujarnya.

Selain itu Ombudsman juga menemukan Â masih ada praktik penjualan buku Lembar Kerja Siswa (LKS) yang dilakukan di beberapa sekolah yang sifatnya diwajibkan. Sampai ada temuan wawancara dengan beberapa siswa, Â jika tidak memiliki LKS, Â sanksinyaÂ Â tidak diikutsertakan dalamÂ proses belajar mengajar.

Menanggapi hal itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Maluku Utara Sofyan Ali mengatakan, seharusnya tidak ada Â penjualan buku Lembar Kerja Siswa, Â karena Lembar Kerja Siswa adalah kewajiban guru untuk menyusunnya, bukan dibebankan kepada siswa dengan cara membeli.

Tujuan diadakannya diskusi ini untuk menilai seberapa efektif pengadaan buku teks utama melalui 20% Â dana BOS yang Â dilakukan Â sekolah. Hasil dari Diskusi ini akan dideseminasi sebagai bahan evaluasi baik Â Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun para Â Sekolah SD dan SMP Â di Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan.Â (naco)

Â